

Kebijakan Anggaran Pengendalian Karhutla Di Provinsi Riau

2017



Di Produksi oleh;
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau

Kebijakan Anggaran Pengendalian Karhutla Di Provinsi Riau



Sumber : <http://beritadaerah.co.id>

Target Kinerja Pengendalian Karhutla

Berdasarkan hasil analisis isu-isu strategis sebagai baseline penyusunan rencana kebijakan jangka menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, maka permasalahan utama sektor kehutanan terdiri dari: (i) tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan dimana kerusakan kawasan hutan pada tahun 2013 adalah seluas 1,53 juta Ha; (ii) belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan lindung; (iii) belum optimalnya konservasi hutan dan lahan dimana rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2013 hanya berhasil dilaksanakan pada 95.000 Ha; dan (iv) rendahnya peran serta masyarakat desa sekitar hutan.

Bencana alam yang ditimbulkan oleh aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana terlihat pada banjir bandang serta kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Permasalahan dan implikasi tersebut seharusnya dapat

direspons melalui Misi ke-8 pemerintah daerah provinsi Riau yaitu meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata, khususnya melalui program strategis dan indikator kinerja satuan kerja yang bertanggung jawab secara penuh.

Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu program strategis pembangunan daerah dengan target kinerja yaitu untuk menurunkan 100 persen luas kebakaran dari 15.269 Ha (baseline tahun 2014) menjadi 0 Ha pada tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah memberikan pagu anggaran indikatif selama lima tahun sebesar Rp6,6 miliar. Adapun pelaksana program tersebut meliputi BLH, BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, BPMPPD, dan Badan Koordinasi Penyuluhan.

1 Perda No. 7 tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Riau, Bab 4 – Analisis Isu-isu Strategis; Hal 205

2 Ibid. Bab 5 – Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Hal 215

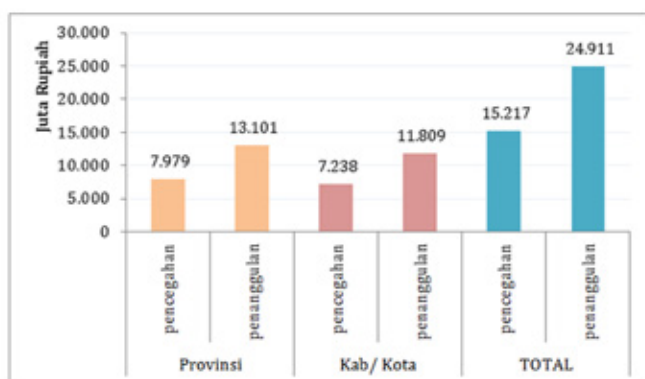
3 Ibid. Bab 7 – Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Hal 263

4 Ibid. Bab 8 – Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Kebutuhan Daerah; Hal 272

Estimasi Kebutuhan Anggaran Karhutla

Secara umum kebutuhan anggaran dapat dihitung berdasarkan jumlah belanja Karhutla yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau, dan 12 Pemerintah Kabupaten/ Kota seluruh Riau. Bahwa total belanja Karhutla Provinsi Riau tahun 2016 adalah sebesar Rp21,08 miliar yang terbagi dalam kegiatan pencegahan Rp7,97 miliar dan kegiatan penanggulangan Rp13,10 miliar. Adapun belanja pengendalian Karhutla tahun 2016 pada seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau adalah sebesar Rp19,04 miliar yaitu meliputi kegiatan pencegahan Rp7,23 miliar dan kegiatan penanggulangan Rp11,80 miliar.

Grafik 1 – Anggaran Karhutla tahun 2016 di Provinsi Riau dan Kab/ Kota



Sumber: APBD Prov. Riau dan APBD Kab/Kota 2016; Diolah FITRA Riau

Berdasarkan grafik diatas, total anggaran pengendalian Karhutla yang dialokasikan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di Riau telah mencapai angka sebesar Rp40,12 miliar. Alokasi untuk kegiatan pencegahan berjumlah Rp15,21 miliar sedangkan alokasi untuk membiayai kegiatan penanggulangan adalah senilai Rp24,91 miliar.

Selama ini SKPD yang banyak bekerja untuk melakukan kegiatan pencegahan adalah SKPD Kehutanan. Namun pada akhir tahun 2016 akan dilakukan penarikan kewenangan dari tingkat kabupaten/ kota ke tingkat provinsi. Maka sejak tahun 2017, pemerintah provinsi harus mempersiapkan tambahan alokasi pencegahan sejumlah anggaran pencegahan yang telah dialokasikan oleh kabupaten/ kota.

Sehingga estimasi makro kebutuhan anggaran pengendalian Karhutla Provinsi Riau setiap tahun adalah paling sedikit Rp36,29 miliar, yang merupakan akumulasi dari perhitungan alokasi pencegahan provinsi dan kabupaten/ kota ditambah dengan alokasi pencegahan provinsi, merujuk kepada kebijakan tahun berjalan 2016.

Estimasi anggaran ini disimulasikan setiap tahun. Adapun baseline data yang dijadikan sebagai target sasaran dari masing-masing kegiatan adalah data Karhutla tahun 2015 dan data statistik sektoral. Pada dasarnya rasionalisasi perhitungan kebutuhan anggaran ini dilakukan untuk memperjelas sasaran kinerja, mempertegas pembagian peran antar sektor, memperkuat kerangka kolaborasi, dan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas anggaran.

Alokasi Anggaran Karhutla Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) terhadap alokasi anggaran pengendalian karhutla cenderung meningkat. Misalnya, dari tahun 2015 anggaran karhutla sebesar Rp5,15 milyar naik cukup signifikan pada tahun 2016 menjadi Rp21,08 milyar, terus naik kembali di tahun 2017 menjadi sebesar Rp29,32 milyar. Namun peningkatan anggaran tersebut belum menunjukkan komitmen terhadap target kinerja pemerintah terhadap pengendalian karhutla. Pengendalian Karhutla secara terperinci diatur dalam UU No. 26 tahun 2014, Inpres No 11 tahun 2015. Tahapan pengendalian yang dimaksud tersebut adalah meliputi pengendalian, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan.



Foto oleh BNPB



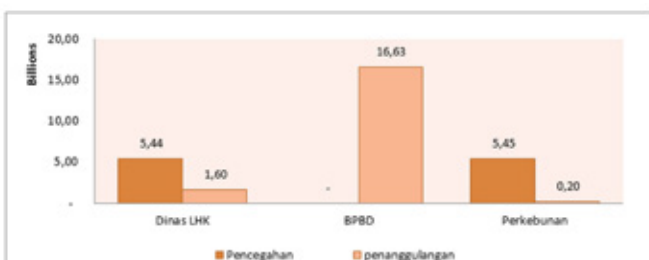
Sumber Foto : aksipost.com

Target kinerja pengendalian karhutla jika dilakukan secara sistematis maka dapat mempercepat mengurangi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Namun sebaliknya, kinerja pengendalian karhutla tidak sesuai dengan skema pengendalian karhutla sebagaimana ketentuan perundang-undangan, bahkan selama tiga tahun berturut-turut (2015-2016) kinerja pengendalian karhutla tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai. Hal itu dibuktikan misalnya, pada aspek pencegahan yang jauh lebih penting untuk dilakukan justru minim alokasi, sebaliknya pemerintah lebih memprioritaskan terhadap aspek penanggulangan. Pada tahun 2017 anggaran pengendalian karhutla dialokasikan sebesar Rp29,3 milyar. Dari angka itu, yang

di pergunakan untuk pencegahan sebesar 37%, atau Rp10,9 milyar, sedangkan untuk penanggulangan karhutla sebesar 63% atau Rp.18,4 milyar. Artinya pemerintah selama ini hanya focus terhadap penanganan karhutla yang tentu sudah terjadi kerusakan akibat kejadian kebakaran hutan dan lahan itu sendiri.

Disamping minimnya anggaran untuk pencegahan, target kinerja pemerintah terhadap pengendalian karhutla yang dituangkan dalam kebijakan anggaran hanya fokus pada aspek pencegahan dan penanggulangan karhutla berdasarkan sektoral. misalnya, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) biaya pengendalian karhutla dialokasikan sebesar Rp7,04 milyar, terdapat biaya pencegahan sebesar Rp5,4 milyar dan penanggulangan sebesar Rp1,6 milyar. Kemudian melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya melakukan penanggulangan karhutla dengan alokasi sebesar Rp16,6 milyar. Kemudian, pada urusan perkebunan dengan alokasi sebesar Rp5,6 milyar, terdapat untuk biaya pencegahan sebesar Rp5,4 milyar dan pemantauan sebesar Rp200 juta.

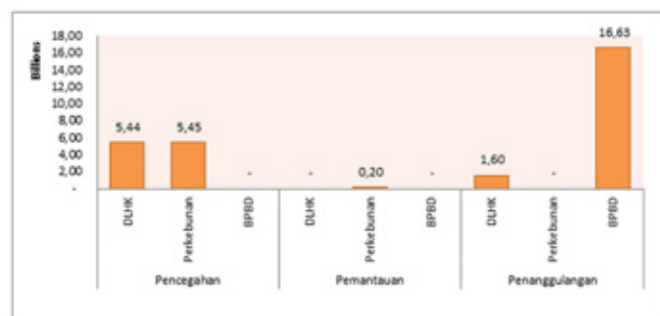
Grafik 2; Anggaran Karhutla Sektoral Tahun 2017



Penggunaan Anggaran Karhutla

Tahun 2017, orientasi belanja karhutla Provinsi Riau melalui urusan sektoral belum memenuhi ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi berdasarkan item belanja sektoral hanya terdapat tiga skema pembiayaan pengendalian karhutla diantaranya, pencegahan, pemantauan dan penanggulangan. Kebijakan anggaran tersebut belum menyentuh pada aspek pemulihan, mengingat selama kejadian karhutla sulit untuk dicegah maka untuk mengembalikan kerugian dari akibat kejadian karhutla maka aspek pemulihan menjadi sangat penting.

Berdasarkan grafik diatas, bahwa di tahun 2017 belanja pengendalian karhutla di Provinsi Riau teridentifikasi untuk tiga aspek, dian-



sumber; APBD Riau tahun 2017, diolah Fitra

taranya aspek pencegahan yang dilaksanakan Dinas LHK dan Perkebunan, dengan masing-masing alokasi anggaran sebesar Rp5,44 milyar dan Rp5,45 milyar. Selanjutnya pada aspek pemantauan dilaksanakan Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp200 juta. Kemudian untuk aspek penanggulangan akan dilaksanakan Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 milyar dan BPBD dialokasikan sebesar Rp16,6 milyar.

Program/Kegiatan Pengendalian Karhutla

Secara rinci dari program kegiatan pengendalian karhutla yang di rencanakan pemerintah daerah Provinsi Riau pada APBD tahun 2017 terdapat alokasi belanja yang tidak terfokus pada urusan sektoral sehingga menimbulkan kesan tumpang tindih kewenangan antara sektoral. Misalnya, pada Dinas LHK di samping melakukan pencegahan juga melakukan penanggulangan kejadian karhutla, begitu juga pada urusan perkebunan, dan hanya BPBD yang hanya fokus pada aspek penanggulangan.



Sumber Foto : Berita Daerah - Riau

Tabel 1; Program/kegiatan pengendalian karhutla Tahun 2017

SKPD	Program/Kegiatan	Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	500,000,000.00
	Pembinaan desa bebas asap	200,000,000.00
	Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	200,000,000.00
	Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau	100,000,000.00
	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	6,542,249,999.00
	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	3,894,999,685.00
	Penanggulangan, pengendalian dan penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	1,600,000,000.00
	Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan	700,000,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	16,625,000,000.00
	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	10,825,000,000.00
	Pelaksanaan Sekretariat Bersama Pusdal Karhutla	5,300,000,000.00
	Kegiatan operasi siaga darurat penanggulangan bencana karhutla	500,000,000.00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	5,650,000,000.00
	Dem-Farm Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	700,000,000.00
	Pemantauan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	200,000,000.00
	Pembangunan Water Management Di Kawasan Perkebunan	4,750,000,000.00

Sumber; APBD Riau tahun 2017, diolah Fitra



Sumber Foto : <http://ppid.menlhk.go.id>



Sumber Foto BNPB

Secara nominal belanja karhutla Provinsi Riau terdapat kenaikan dari tahun 2016 dengan alokasi sebesar Rp21,08 milyar, naik menjadi Rp29,7 milyar di tahun 2017. Namun melihat dari program/kegiatan yang direncanakan sama sekali belum memenuhi target kinerja pengendalian karhutla sebagaimana dijelaskan diatas. Bahkan pemerintah saat ini cenderung meningkatkan alokasi pengendalian karhutla pada aspek pengendalian yang tidak efektif lagi. Jika demikian maka pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pemulihan akibat dari bencana kebakaran hutan dan lahan yang lebih signifikan untuk dilakukan saat ini.

Rekomendasi;

Untuk memperbaiki target kinerja pengendalian karhutla, maka pemerintah Provinsi Riau harus melakukan langkah cepat untuk mengurangi tingkat kejadian kebaruan hutan dan lahan; diantaranya;

1. Rencana kerja pengendalian karhutla, harus dilakukan terkoordinasi baik di Provinsi Riau maupun kabupaten / kota dengan melibatkan berbagai sektor;
2. Rencana kerja pengendalian karhutla harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari pengendalian, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan sehingga kelemahan selama ini terhadap pengendalian karhutla dapat diperbaiki;
3. Kebijakan anggaran terhadap pengendalian karhutla harus lebih memadai sesuai tingkat kebutuhan di tiap-tiap daerah terhadap pengendalian karhutla;
4. Review/Audit perizinan perusahaan (Perkebunan & HTI) mutlak harus dilakukan sebagai tanggung jawab perusahaan, bahkan penegakan hukum/pemberian sanksi berupa pencabutan izin penting dilakukan terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan perundang-undangan;
5. Moratorium hutan dan lahan saat ini juga harus dilakukan agar tidak ada izin baru terhadap penguasaan hutan, sehingga pemerintah lebih fokus untuk memperbaiki kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkan dari izin-izin terdahulu;



The Asia Foundation

